

## Peranan Kiai Kemas H.M.Zen Mukti (1338-1400 H/ 1919-1980 M) Dalam Politik Dan Dakwah Di Palembang

Okta Supriani

Program Studi Sejarah Peradaban Islam

E-Mail: [dayitaokta@gmail.com](mailto:dayitaokta@gmail.com)

### Abstrak

Tulisan ini membahas peranan Kiai Kemas H.M.Zen Mukti dalam politik dan agama di Palembang. Kiai Kemas H.M.Zen Mukti merupakan salah satu mantan anggota Masyumi, kontribusinya dalam politik dan dakwah di Palembang terbilang cukup mumpuni. Tudingan atas keterlibatan Masyumi dalam PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) memberikan catatan kelam bagi mantan anggota Masyumi di masa Orde Baru. Dalam penelitian ini mencoba mengungkap sisi lain dari mantan anggota partai Masyumi dan menganalisis mengapa para mantan anggota Masyumi bertransisi ke arah Islam Kultural pada masa Orde Baru. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data seperti studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan mengacu pada prosedur penelitian sejarah, pendekatan ilmu sosiologi digunakan sebagai ilmu bantu dalam penelitian dengan berfokus pada teori stratifikasi sosial dan teori peranan untuk menganalisis kedudukan dan status tokoh Kiai Kemas H.M.Zen Mukti. Penelitian ini menjelaskan mengenai kiprah Kiai Kemas H.M.Zen Mukti dalam aktifitas politik dan agama di Palembang. Penelitian ini juga mengungkap bahwa era Orde Baru peranan ulama birokrat menjadi mati suri dalam masalah politik. Kejayaan para anggota partai Masyumi di masa Orde Lama menjadi samar di tangan rezim Orde Baru. Intervensi rezim Orde Baru terhadap ulama politik juga berpengaruh pada peranannya dalam kehidupan bernegara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang kehidupan dan peranan Kiai Kemas H.M.Zen Mukti sebagai ulama birokrat yang berkontribusi dalam politik dan agama di Palembang.

**Kata kunci:** ulama, politik, agama, Orde Baru.

### Abstract

*This paper discusses the role of Ki.Kms.H.M. Zen Mukti in politics and religion in Palembang. Ki.Kms.H.M. Zen Mukti is a former Masjumi member, his contribution to politics and da'wah in Palembang is quite capable. The accusation of Masyumi's involvement in the PRRI (Revolutionary Government of the Republic of Indonesia) provides a dark note for former Masjumi members during the New Order era. In this study tries to reveal the other side of the former Masjumi party members and analyze why the former Masjumi members transitioned to cultural Islam during the New Order era. This study uses three data collection techniques such as literature study, interviews and documentation. The type of research used is qualitative by referring to historical research procedures,*

*social stratification*  
*ti. This research describes the progress of Ki.Kms.H.M. Zen Mukti in political and religious activities in Palembang. This research also reveals that in the New Order era, the role of bureaucratic clerics became suspended in political matters. The triumph of the Masjumi party members during the Old Order became dim in the hands of the New Order regime. The New Order regime's intervention against political clerics also influenced their role in the life of the state. The purpose of this study was to determine the life background and role of Ki.Kms.H.M. Zen Mukti as a bureaucratic scholar who contributes to politics and religion in Palembang.*

**Keywords:** ulama, politics, religion, New Order.

## A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya kedudukan ulama tidak hanya berperan dalam sosial keagamaan, namun juga berperan dalam masalah seperti politik dan pendidikan. Menurut Kamar dalam (Ahdi Makmur, 2016: 20) seiring dengan tingginya posisi seorang ulama, diluar aktivitas keagamaan yang sering dilakukan dapat merusak citra baik di masyarakat. Seperti adanya keterlibatan ulama dalam politik menjadikan peranan sentral sebagai pembina keagamaan mengalami pemburaman. Akibatnya, lama laun terjadi penurunan wibawa dan penghormatan terhadap ulama itu sendiri. Walaupun demikian, dari kaca mata partai keterlibatan ulama dalam aktivitas politik ini dinilai sangat menguntungkan, sebab mudahnya mencari dukungan massa lewat ulama-ulama yang telah masuk dalam partai politik tersebut.

Di lihat dari perspektif kekuasaan, Yunus Gilani menjelaskan sebetulnya ulama terbagi atas dua macam. Pertama, ulama birokrat atau ulama yang terlibat dalam aktivitas pemerintahan dan negara. Ulama ini biasanya cenderung loyalitas terhadap para penguasa dan pemerintah. Kedua, ulama bebas atau ulama yang tidak terikat dengan para penguasa atau tokoh politik. Biasanya ulama ini cenderung melibatkan diri dalam aktivitas sosial keagamaan dan tidak tunduk terhadap penguasa (Ahdi Makmur, 2016: 34).

Dengan demikian, ini membuktikan bahwasannya ulama yang dahulu diakui sebagai aktor keagamaan, namun dalam perkembangannya mengalami pergeseran makna kearah yang bersifat negatif. Dalam pandangan masyarakat, keterkaitan ulama dengan pemerintah dapat memunculkan kepincangan, dimana dakwah tidak lagi dimaknai sebagai prioritas utama yang harus dikedepankan melainkan sebuah tameng untuk merahi kekuasaan.

Era Orde Baru peranan ulama dalam aktivitas sosial keagamaan di masyarakat tidak mengalami penurunan, berbeda dengan kondisi peranan ulama dalam masalah politik. Di masa ini eksistensi ulama mengalami disintegrasi terutama kalangan ulama birokrat. Kebijakan yang cenderung otoriter menimbulkan polemik di kalangan umat Islam secara luas karena merugikan umat Islam. Rezim Orde Baru saat itu dominan memaksakan ideologi Pancasila dan lebih fokus pada aspek pembangunan dibandingkan masalah ideologi. Kondisi ini merupakan dampak dari ketidaksukaan pemerintah terhadap kalangan Islam politik di masa awal. Intervensi rezim Orde Baru itu pun bukan tidak beralasan, kecemasan akan kembalinya kelompok-kelompok yang dianggap akan menentang dan melengserkan pemerintah adalah salah satu penyebabnya. Ketakutan ini bermula ketika pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi konflik antara partai Masyumi dan pemerintah Orde Lama yang mengakibatkan dibubarkannya partai tersebut. Hingga masa Orde Baru pun rehabilitas partai Masyumi tetap tidak diperbolehkan.

Masa Orde Baru inilah banyak dari kalangan Islam politik yang bertransformasi menjadi pendakwah. Kalangan ini biasanya lebih bersifat kultural dengan fokus pada urusan agama dan sosial di masyarakat. Seperti para mantan anggota Masyumi yang sudah tidak mendapat tempat di dunia politik Indonesia mulai bertransformasi menjadi pendakwah. Salah satunya Kiai Kemas Haji Muhammad Zen Mukti atau Kiai Kemas H.M.Zen Mukti. Dahulunya ia merupakan figur yang aktif dalam dunia pemerintahan dan partai politik di Palembang. Namun dengan hengkangnya Masyumi dalam dunia politik, kondisi tersebut juga berimplikasi terhadap eksistensinya dalam panggung politik. Setelah tidak lagi menjejal dunia politik Kiai Kemas H.M.Zen Mukti meniti kembali karir dengan menjadi pendakwah. Transformasinya ia mulai dengan masuk menjadi keanggotaan Masjid Agung Palembang dan masuk pula dalam Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Sepanjang pengetahuan peneliti masih jaranganya kajian yang mengungkap sisi lain dari seorang ulama birokrat. Hampir semua studi tentang peranan tokoh ulama birokrat terfokus pada para petinggi partai, masih langka sekali ditemui studi yang secara khusus membahas mengenai peranan para mantan anggota partai yang secara historis juga terlibat dalam politik. Eksistensi para mantan anggota partai sering kali tidak begitu diperdulikan. Maka atas dasar itulah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peranan Kiai Kemas H.M.Zen Mukti, mengingat ia merupakan salah satu mantan anggota partai Masyumi. Masalah pokok dalam penelitian ini bagaimana peranan bagaimana peranan Kiai Kemas H.M.Zen Mukti (1338-1400 H/1919-1980 M) dalam politik dan dakwah di Palembang?

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Kajian tentang peranan tokoh Kiai Kemas H.M.Zen Mukti masih terbilang langka, walaupun sebelumnya telah ada beberapa penelitian terkait Kiai Kemas H.M.Zen Mukti. Akan tetapi pembahasannya belum tuntas secara konferehensif. Berikut ini beberapa hasil karya terkait judul penelitian, pertama buku yang ditulis oleh Djohan Hanafiah yang berjudul Delapan Puluh Dua Tahun Pemerintahan Kota Palembang. Dalam buku ini menjelaskan tentang struktur pemerintahan kota Palembang pada masa peralihan masa walikota M.Ali Amin. Dalam struktur pemerintahan tersebut termasuklah salah satu pengurusnya ialah Kiai Kemas H.M.Zen Mukti dari partai Masyumi. Kedua, buku yang ditulis oleh Kemas Andi Syarifuddin dan Hendra Zainuddin yang berjudul 101 Ulama Sumsel: Riwayat Hidup Dan Perjuangannya, buku ini menjelaskan mengenai biografi dan perjuangan ulama-ulama yang ada di Palembang dan termasuklah menjelaskan tentang biografi tokoh ulama Kiai Kemas H.M.Zen Mukti. Akan tetapi, dalam buku ini hanya

membahas sebagian kecil saja daripada karir beliau sehingga belum menyajikan secara lengkap peranan beliau baik dalam bidang keagamaan maupun politik. Dari kedua sumber tersebut dapat dipastikan masih minimnya penelitian terkait Kiai Kemas H.M.Zen Mukti.

### **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada metode penelitian sejarah atau historis guna merekonstruksi peristiwa masa lampau. Gottschalk menyebutkan jika metode historis merupakan cara untuk menganalisis dan mengkritisi peninggalan masa lampau (Louis Gottschalk, 1975: 32). Dalam penelitian sejarah memiliki beberapa tahapan penting. Pertama, heuristik adalah tahap awal dalam mencari dan mengumpulkan sumber-sumber berkenaan dengan judul penelitian. Kedua, verifikasi (kritik sumber) berguna untuk memperoleh otentisitas (keaslian) dan kredibilitas (kesahihan) sumber. Ketiga, interpretasi (penafsiran data), penafsiran data ini dilakukan dengan dua tahap yaitu analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan). Terakhir ialah historiografi (penulisan sejarah), Setelah semuanya telah dilakukan maka tahap akhir dari sebuah penelitian sejarah yaitu penulisan.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kiai Kemas H. M. Zen Mukti memiliki nasab Kemas Haji Muhammad Zen bin Kemas Muhammad Mukti bin Kemas Haji Hasan (Khatib Penghulu) bin Kemas Haji Agus. Zen Mukti merupakan anak tertua dari tiga bersaudara, ayahnya bernama Kemas Muhammad Mukti dan ibunya bernama Nyimas Mayu binti Kemas Muhammad Amin. Lahir di Palembang pada tanggal 27 Juli 1338 H/1919 M, dan wafat di Palembang pada 18 Juni 1400 H/ 1980 M. Pendidikan Kiai Kemas H.M.Zen Mukti ditempuh di sekolah milik Belanda Gubernur terletak di Kel. 24 Ilir Palembang pada tahun 1927-1934 M. Selanjutnya menempuh pula pendidikan sekolah agama di Madrasah Nurul Falah dan terakhir sempat kuliah di Akademi Penerangan Yogyakarta (Nyimas Nurul Amani, wawancara, 14 April 2020).

Dilihat dari silsilah keturunannya, Kiai Kemas H.M.Zen Mukti merupakan keturunan asli Palembang yang bergelar Kemas. Kemas ini merupakan gelar yang disematkan pada anak laki-laki dari hasil pernikahan antara perempuan yang berstatus Masayu dan laki-laki dari golongan rakyat biasa. Umumnya dalam tradisi masyarakat Palembang, stratum masyarakat terdiri atas empat golongan, yaitu Raja atau Sultan, bangsawan, rakyat dan budak (Nawiyanto, dkk., 2016:54-59).

Kiai Kemas H.M.Zen Mukti ini merupakan orang yang begitu gemar menulis, kegemarannya dalam menulis disalurkan lewat beberapa hasil karya seperti Sejarah Kota Palembang Dan Adat Istiadat, Masalah Kebebasan Wanita Dalam Islam, Lima Puluh Masalah Agama Dengan Jawabannya (1968), dan Wasiat (Kemas Andi Syarifuddin dan Hendra Zainuddin., 2012:200). Sebelum menulis banyak buku sekitar tahun 1950'an, rupanya Kiai Kemas H.M.Zen Mukti pernah juga terlibat dalam dunia pers. Pada saat itu ia sempat memimpin sebuah surat kabar dan majalah "Suluh Peladjar" atau "Suluh Masyarakat" bersama dengan Tjik Man Ar. Kemudian surat kabar "Al-Balagh" yang berganti nama menjadi "Penerangan" terbit pada tahun 1950 bersama Husin Muin di Palembang (Dudy Oskandar, *Berita Pagi*, Sabtu 21 Desember 2019).

Awal karir politik Kiai Kemas H.M.Zen Mukti dibangun saat menjadi anggota partai Masyumi. Ketika Masyumi berada di puncak kejayaan, keadaan tersebut juga dirasakan oleh para anggota-anggota partai Masyumi tak terkecuali Kiai Kemas H.M.Zen Mukti. Walaupun hanya menjadi bagian kecil dari partai Masyumi, eksistensinya dalam pemerintahan kota Palembang terbilang mumpuni. Ini terbukti dengan berhasilnya ia masuk dalam struktur pemerintahan kota Palembang pada tahun 1955-1961 yang pada saat itu tengah terjadi masa peralihan kekuasaan dari dari Walikota Mr.R.Sudarman Gandasubrata (1950-1955) lalu digantikan oleh R. Acmad Abusamah sebagai PLT Walikota Palembang kemudian M.Ali Amin diangkat menjadi Walikota baru (Dedi Irwanto & Muhammad Santun, 2011:160).

Pada masa jabatan Walikota M.Ali Amin karir politik Kiai Kemas H.M.Zen Mukti cukup cemerlang, dimana ia diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) peralihan tahun 1955-1960 dan menjadi anggota Dewan Pemerintahan Daerah peralihan dengan jabatan seksi pekerjaan umum mewakili partai Masyumi (Djohan Hanafiah, 1988: 23-25). Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai anggota Departemen Penerangan Provinsi Sumatera Selatan seksi publikasi tahun 1950 serta sebagai anggota DPRD tingkat I Provinsi Sumatera Selatan tahun 1956-1959 (Kemas Andi Syarifuddin dan Hendra Zainuddin, 2012:200). Dengan demikian, sebetulnya inilah alasan kenapa Kiai Kemas H.M.Zen Mukti juga berkontribusi terhadap kemajuan kota Palembang, perannya sebagai anggota Masyumi dan keterlibatannya dalam berbagai pembangunan kota Palembang seperti pembangunan pasar Cinde masa peralihan adalah salah satu contohnya. Walaupun kontribusinya tersebut tidak begitu besar.

Selain berkontribusi terhadap pemerintahan kota Palembang, Kiai Kemas H.M.Zen Mukti juga berperan sebagai pendakwah. Di lihat dari kaca mata kekuasaan Ki. Kms.H. M. Zen Mukti termasuk dalam kategori golongan ulama birokrat. Berbeda dengan ulama birokrat kebanyakan, pada awalnya ia merupakan seorang tokoh politik yang bertransformasi menjadi juru dakwah.

Keunikan ini sesungguhnya terjadi bukan karena kebetulan, akibat adanya intervensi rezim Orde Baru terhadap kaum politik Islam menjadi salah satu faktor penyebabnya. Tidak hanya sampai disitu saja, pada masa Orde Baru ketidaksukaan presiden Soeharto tersebut turut berimplikasi terhadap kehidupan umat Islam. Latar belakang politik yang berasal dari partai Masyumi yang pada masa Orde Lama menjadi partai terlarang adalah penyebabnya. Pemerintah Orde Baru menuding jika kembalinya para tokoh Masyumi dalam panggung politik Indonesia akan memicu kekacauan dalam pemerintahan dan dinilai juga dapat merobohkan kekuasaan Orde Baru.

Sebetulnya hubungan partai Masyumi dengan pemerintah Orde Lama pada awalnya berjalan dengan baik. Namun setelah presiden Soekarno memawakan Ideologi Nasakom pada masa demokrasi Terpimpin upaya tersebut sangat ditentang oleh partai Masyumi. Penolakan ini bukan tidak berdasar, ideologi Nasakom yang menghendaki persatuan antara paham nasionalisme, agama Islam dan marxisme (komunis) dalam satu wadah dinilai berlawanan dengan prinsip agama Islam karena dalam ideologi tersebut juga dimasukkan prinsip-prinsip paham Komunis (M.C.Riclefs, 2008:556).

Konfrontasi ini semakin kuat dengan adanya tuduhan terhadap tokoh-tokoh partai Masyumi yang dinilai presiden Soekarno terlibat dalam pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di berbagai daerah. Kecurigaan tersebut bukan tidak berdasar, partai Masyumi yang merupakan basis partai terbesar memiliki pengaruh hampir seluruh daerah di Indonesia seperti Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku terkecuali Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan basis partai PNI, NU dan PKI. Sejak tahun 1958 daerah yang memiliki pengaruh Masyumi seperti Sumatera, Sulawesi dan Maluku disinyalir merupakan pusat pemberontakan tersebut. Ketidak harmonisan antara para pemimpin tokoh Masyumi seperti Natsir dengan presiden Soekarno juga menajamkan konflik di antara keduanya, berawal dari tuduhan kepada partai Masyumi pada saat demokrasi Terpimpin yang disebut-sebut ingin menghambat revolusi Indonesia. Atas dasar itulah pada tahun 1960 presiden membubarkan Soekarno partai Masyumi bersama dengan PSI ( Ahmad Syafii Maarif, 1985:187-190).

Era Orde Baru, juga mengalami hal yang sama rehabilitasi partai Masyumi mengalami penolakan karena dianggap memiliki catatan kelam pada masa Orde lama. Oleh sebab itulah presiden Soeharto enggan memulihkan kembali partai tersebut, akibat dari catatan tersebut juga turut berimplikasi terhadap para mantan anggota partai Masyumi yang tidak diperbolehkan lagi untuk menginjakkan kaki dalam panggung politik Indonesia terlebih para tokoh-tokoh

pemimpinnya. Hal ini dikhawatirkan akan menghidupkan kembali partai Masyumi masa Orde Baru (Fathurohman, 2010: 99).

Selain catatan hitam partai Masyumi masa Orde Lama, pada masa Orde Baru pun kondisi kalangan Islam politik termarginalkan. Rezim Orde Baru pun cenderung bersikap otoriter terhadap umat Islam. Abdul Azis Thaba mengamati bahwa selama masa Orde Baru wujud relevansi kalangan Islam politik dan pemerintah terbagi dalam tiga pola. Pertama pola hubungan bersifat antitesis yang terjadi antara kurun tahun 1966-1982, dalam artian bahwa hubungan tersebut berlawanan dimana posisi pemerintah yang terlalu hegemonik menjadikan kalangan Islam berada di bawah. Kedua pola hubungan bersifat resiprokal kritis (1982-1985), dimana konfrontasi yang terjadi lebih bersifat koseptual walaupun sifat antagonistik masih melekat. Hal ini karena kedua belah pihak mulai menyadari adanya keuntungan dari hubungan timbal balik tersebut. Ketiga pola hubungan akomodatif (1986-1994), pola ini merupakan implikasi hubungan simbiosis mutualisme antara pemerintah dan kalangan Islam politik (Abdul Azis Thaba, 1997: 240).

Jika mencermati pendapat Abdul Azis Thaba, ini menunjukkan selama fase antara kurun waktu tahun 1966-1982 eksistensi para kalangan Islam politik mengalami pengekanan dan kontrol penuh dari pemerintah hingga terjadilah depolitisasi terhadap umat Islam yang berdampak kepada umat Islam secara global lewat aturan-aturan yang dibuat pemerintah masa itu. Namun pada kurun waktu tahu 1982-1985 terjadi hubungan timbal balik antara pemerintah dengan kalangan Islam politik, pada fase inilah pemerintah Orde Baru mulai terbuka. Imbas dari hubungan mutualisme tersebut hingga kurun waktu tahun 1986-1994 keharmonisan mulai terjalin kembali hingga melahirkan apa yang disebut sebagai Islam Kultural.

Pada hakikatnya Islam Kultural ini merupakan arah baru umat Islam yang lebih berorientasi pada kebudayaan. Sehingga *mindset* umat Islam tidak hanya berfokus ke arah politik melainkan juga berfokus ke arah lain seperti kehidupan beragama dan sosial masyarakat dan sebagainya. Kuntowijoyo melihat jika wajah baru Islam Indonesia tersebut terbentuk karena tiga faktor yaitu adanya gerakan intelektual, gerakan etik dan gerakan estetik. Gerakan-gerakan inilah yang nantinya akan membentuk pola Islam Kultural (Muh. Syamsuddin & Muh. Fatkhan, *Jurnal Dakwah*, Juli-Desember 2010: 147). Transformasi konsep Islam ini ditandai dengan beberapa ciri diantaranya yakni: pertama, semakin menjamurnya kaum pemimpin intelektual Islam dan pudarnya para pemimpin politik Islam terutama dikalangan terpelajar. Kedua, semakin lemahnya bahasan mengenai masalah yang bersifat furu'iyah dan tampak semakin menonjolnya isu-isu berkenaan dengan sosial, ekonomi, intelektual dan estetika dalam Islam. Ketiga, semakin melemahnya sikap penganut mazhab-mazhab dan semakin maraknya sikap-sikap non mazhab

disebagian besar kalangan umat, terutama dikalangan generasi muda Islam. Keempat, munculnya wajah Islam baru yang lebih inklusif sehingga konsep umat Islam yang tadinya eksklusif khususnya dikalangan partai politik Islam dan organisasi massa mengalami pelanggaran konsep (Nor Huda, 2015: 94).

Melihat alterasi tersebut, ciri yang mendasar adalah orientasi umat Islam bukan lagi mengarah kepada kekuasaan namun lebih mengarah pada aspek dakwah dan pencerahan terhadap umat Muslim sendiri. Hal ini nampak jelas ketika kaum intelektual Muslim begitu kentara mendominasi gerakan Islam ketimbang masa awal Orde Baru yang umumnya masih dipegang oleh kalangan ulama dan politikus Muslim. Ternyata konsep Islam kultural ini telah menjadi alternatif baru bagi umat Islam dalam membangun bangsa. Sisi positif dari depolitisasi umat Islam tersebut turut berimplikasi dengan diterimanya kembali umat Islam oleh pemerintah Orde Baru.

Kondisi inilah yang memicu Kiai Kemas H.M.Zen Mukti beraklimatisasi dengan terjun dalam dunia dakwah. Citra buruk yang melekat pada partai Masyumi yang pernah diikutinya tersebut, turut berimbas terhadap karir politiknya di masa Orde Baru. Walaupun pada masa Orde Baru ia sempat terjun kembali dalam dunia politik lewat masuk dalam Partai Persatuan Pembangunan namun tak lama setelahnya ia mengundurkan diri dan fokus pada dakwah saja. Sebenarnya Partai Persatuan Pembangunan ini hadir sebagai tameng pemerintah Orde Baru dalam rangka menaklukkan seluruh kalangan politik Islam guna mempermudah pengawasan terhadap pergerakan partai-partai Islam. Partai Persatuan Pembangunan ini merupakan campuran dari berbagai macam latar belakang partai Islam seperti partai Muslim Indonesia (Parmusi), partai Nahdatul Ulama, Pergerakan Islam Tarbiyah (Perti), dan Partai Syariat Islam Indonesia (PSII) (M.Rusli Karim, 1999: 61).

Di masa Presiden Soeharto, tidak hanya partai-partai Islam saja yang mengalami fusi namun kondisi ini ikut pula dirasakan oleh partai-partai lain seperti PDI (Partai Demokrat Indonesia) yang merupakan campuran dari partai-partai yang berbasis nasionalis, sekuler dan non Islam (Nor Huda, 2015:93). Dengan adanya peleburan partai-partai tersebut memudahkan pengontrolan terhadap pergerakan partai-partai di masa Orde Baru. Inilah kenapa masa Orde Baru sering disebut pula sebagai rezim yang otoriter.

Dengan mengamati bagaimana nasib partai politik di masa Orde Baru tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa potret perpolitikan di masa itu cenderung berada dibawah bayang-bayang pemerintah sehingga sikap kebebasan tidak sepenuhnya berada di tangan partai politik. Transformasi umat Islam di masa itu ikut pula merombak wajah baru kaum birokrat, seperti para mantan anggota partai Masyumi yang ikut pula mendapat imbas dari keotoriteran rezim Orde Baru.



Peranan dakwah Kiai Kemas H.M.Zen Mukti dimulai ketika menjadi anggota kepengurusan Masjid Agung Palembang tahun 1960-1980, pada saat itu ia diamanatkan menjadi penceramah, khatib sekaligus imam daripada Masjid Agung Palembang. Selain aktif mengisi ceramah di Masjid Agung Palembang, ia juga aktif mengisi ceramah di TVRI Sumatera Selatan dan radio Merpati Nirbaya (Nyimas Syukriani, wawancara, 03 Mei 2020). Sementara itu, dalam buku 261 Tahun Masjid Agung Dan Perkembangan Islam Di Sumatera Selatan menjelaskan jika Kiai Kemas H.M.Zen Mukti sudah terlibat dalam kepengurusan masjid Agung Palembang sejak tahun 1979-1986 dengan menjabat sebagai anggota seksi dakwah (Djalaludin, 2008: 41). Selain terlibat dalam kepengurusan masjid Agung Palembang, Kiai Kemas H.M.Zen Mukti juga bergabung dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Hal ini terlihat dari sambutan ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia cabang Sumatera Selatan K.H.A. Rasjid Siddiq dalam mukadimah salah satu karyanya yang berjudul "Lima Puluh Masalah Agama Dengan Jawabannya" terbit tahun 1968.

Jika melihat latar belakang Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini merupakan bentukan dari para mantan anggota partai Masyumi yang dikenal dengan sebutan Keluarga Besar Bulan Bintang. Pembentukan DDII ini sebetulnya usaha umat Islam dalam mewujudkan para ulama, cendekiawan dan mujahid dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dakwah Islam (Darwin Zainuddin & Fakhur Adabi Abdul Kadir, Jurnal *Analytica Islamica*, 2013:2). Dengan demikian, jika mencermati peranan dakwah Kiai Kemas H.M.Zen Mukti tersebut, dapat ditarik kesimpulan jika aklimatisasi terhadap pola kebijakan rezim Orde Baru yang otoriter telah membawanya dalam arah baru yang disebut sebagai Islam Kultural. Arah baru ini tidak hanya memberi perubahan terhadap Kiai Kemas H.M.Zen Mukti namun juga terhadap partai Masyumi.

Selain giat mendakwahkan agama Islam, Kiai Kemas H.M.Zen Mukti juga pernah berkontribusi dalam kegiatan sosial keagamaan seperti mendirikan organisasi keagamaan dengan nama organisasi Remaja Group 22 Ilir. Organisasi ini sendiri merupakan wadah bagi remaja-remaja yang ingin memperdalam ilmu agama dan belajar baca tulis Al-Qur'an. Dalam mendirikan organisasi tersebut, Kiai Kemas H.M.Zen Mukti dibantu oleh sahabatnya dr Kgs.Hj Oejang (KHO) Gajah Nata sebagai tenaga pendidik. Akan tetapi organisasi tersebut tidak begitu berkembang dan sepeinggal Kiai Kemas H.M.Zen Mukti organisasi tersebut mati. Tidak hanya terjun dalam masalah sosial keagamaan, Kiai Kemas H.M.Zen Mukti juga peduli terhadap ilmu pengetahuan dengan membaktikan diri di kampus IAIN Raden Fatah Palembang dan mengajar di fakultas Usuluddin dengan bidang konsentrasi ilmu fiqh (Nyimas Syukriani, wawancara, 03 Mei 2020).

## SIMPULAN

Artikel ini menginformasikan bahwa peranan Kiai Kemas H.M.Zen Mukti dalam segi politik dan agama sesungguhnya dipengaruhi faktor iklim politik yang cenderung tidak stabil. Kuatnya kontrol rezim Orde Baru terhadap kalangan Islam politik memunculkan arah baru yakni Islam Kultural. Keterlibatan Kiai Kemas H.M.Zen Mukti dalam Masyumi telah mendongkrak karir politiknya di masa Orde Lama. Akan tetapi ikut pula menjadi bumerang di masa Orde Baru. Kontribusi Kiai Kemas H.M.Zen Mukti dalam bidang organisasi keagamaan, pembangunan kota Palembang, dakwah Islam dan sebagainya patut untuk diapresiasi.

Jika dilihat dari silsilah keluarga, Kiai Kemas H.M.Zen Mukti berasal dari lingkungan taat beragama dan memiliki status sosial tinggi di masyarakat. Kiprah Kiai Kemas H.M.Zen Mukti telah memberikan gambaran mengenai sisi lain dari seorang ulama birokrat. Keteguhannya dalam menyiarkan agama Islam dapat menjadi panutan hidup bagi setiap Muslim. Dalam usaha memahami peranan para mantan anggota Masyumi dalam politik dan agama, tulisan ini tidak memberikan perhatian khusus pada kondisi Masyumi pada masa Orde Lama.

## Daftar Pustaka

- Azis Thaba, Abdul. *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1997.
- Makmur, Ahdi. *Ulama Dan Pembangunan Sosial*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Syafii Maarif, Ahmad. *Islam Dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Darwin Zainuddin dan Fakhur Adabi Abdul Kadir. "Dinamika Gerakan Dakwah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Di Indonesia". *Jurnal, Analytica Islamica*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- Irwanto, Dedi & Muhammad Santun. *Venesia Dari Timur (Memaknai Produksi Dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pasca Kolonial)*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Dudy Oskandar. "Pers Sumatera Selatan (Pers Perjuangan 1925-1950 Bagian 1)". Berita Pagi, Sabtu 21 Desember 2019. Diakses dari <https://beritapagi.co.id/2019/12/21/pers-sumatera-selatan-pers-perjuangan-1925-1950-bagian-pertama.html>. Pada tanggal 09 April 2020 pukul 11.58.
- Djalaludin. *261 Tahun Masjid Agung Dan Perkembangan Islam Di Sumatera Selatan*. Palembang: Panitia Renovasi Masjid Agung, 2008
- Djohan Hanafiah, *Delapan Puluh Tahun Pemerintahan Kota Palembang*, Palembang: Humas Pemerintah Kota Madya Daerah TK.II Palembang, 1988.
- Fathurohman. *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia: Tinjauan Historis Normatif Pembubaran Parpol*. Malang: Setara Press, 2010.

- Kemas Andi Syarifuddin Dan Hendra ainudin. 101 Ulama Sumsel: Riwayat Hidup Dan Perjuangannya .Jogyakarta: Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2012.
- Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah.Yogyakarta: Tiara Kencana, 2013.
- Gottschalk, Louis. Mengerti Sejarah (Pengantar Metode Sejarah). terj.Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia, 1975.
- Riclefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Terj.Serambi. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Syamsudin, Muh dan Muh.Fatkhan."Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru". Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Jurnal Dakwah*. Vol. XI No. 2 Juli-Desember, 2010.
- Karim, M.Rusli. *Negara Dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999.
- Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi. *Kesultanan Palembang Darussalam (Sejarah Dan Warisan Budayanya)*. Jember: PT Tarutama Nusantara, 2016.
- Huda, Nor. *Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.